Journal of Muslim Community Health (JMCH)
ISSN 2774-4590
Published by Postgraduate Program in Public Health, Universitas Muslim Indonesia

Original Research **Open Access**

Evaluasi Kebijakan Perwali No.22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Makassar

***Andi Tenri Rezki Oji [1], Samsualam**[1],**Sitti Patimah**[1]
[1]*Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia*

**Email : tenrioji0@gmail.com*

ABSTRAK

Latar belakang: Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.Pemerintah kota makassar mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Wali Kota Makassar nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan ini sebagai upaya tanggap COVID 19 pemerintah daerah kota makassar. **Metode**: Metode penelitian ini bersifat kualitatif. Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara mendalam (indepth interview)untuk mengevaluasi Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar. **Hasil**: Hasil penelitian ini menjelaskan tentang input , proses dan output dari Kebijakan Perwali no.22 Tahun 2020, yang meliputi SDMnya ditentukan berdasarkan SK, pembuatan posko diperbatasan, pembatasan aktivitas, pendanaan kebijakan dari APBD, pelaksanaan kebijakan ,efektivitas dan efesiensi kebijakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta pengurangan jumlah kasus Covid-19. **Kesimpulan :** Adanya kebijakan perwali no.22 tahun 2020 dikota Makassar tetap menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan,disatu sisi banyak kalangan yang menyatakan sikap untuk mendorong penerapan PSBB dimana hal tersebut dapat memutus mata rantai penularan dari Covid-19

***Kata kunci** : corona virus, pembatasan sosial berskala besar, perwali no.22 tahun 2020*

ABSTRACT

Background: The mortality rate for COVID-19 in Indonesia is 8.9%, this figure is the highest in Southeast Asia. The Makassar city government issued a policy on the implementation of large-scale social restrictions through Makassar Mayor Regulation number 22 of 2020 concerning the Implementation of Scaled Social Restrictions Big in Makassar City, South Sulawesi Province, this policy is an effort to respond to COVID 19 by the Makassar city-regional government. **Method:** This research method is qualitative. Data collection using observation and in-depth interviews (in-depth interviews) to evaluate Makassar Mayor Regulation number 22 of 2020 concerning the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Makassar City. **Results:** The results of this study explain the inputs, processes, and outputs of the Perwali Policy no.22 of 2020, which includes human resources determined by decree, creation of border posts, activity restrictions, policy funding from the APBD, policy implementation, policy effectiveness and efficiency, successful implementation. policies and reducing the number of Covid-19 cases. **Conclusion:** The existence of guardian policy no.22 of 2020 in the city of Makassar continues to reap the pros and cons of several circles, on the one hand, many people have expressed an attitude to encourage the implementation of PSBB where it can break the chain of transmission from Covid-19

Keywords: *coronavirus, large-scale social restrictions, guardian no.22 of 2020*

LATAR BELAKANG

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.(1)

Berdasarkan pemeriksaan spesimen per hari ini ada 5 provinsi yang penambahan kasus nya tinggi yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jubir Pemerintah untuk COVID-19 dr. Achmad Yurianto mengatakan penambahan kasus positif tersebut disebabkan karena tracing dilakukan lebih agresif sehingga sebagian besar penambahan spesimen dikirim oleh Puskesmas atau dinas kesehatan bukan rumah sakit.(2)

Karena penularan virus corona yang sangat cepat inilah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epidemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat memastikan diri terhindar dari virus corona.(3)

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah *(work from home),* bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.(4)

Pemerintah kota makassar mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Wali Kota Makassar nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan ini sebagai

upaya tanggap COVID 19 pemerintah daerah kota makassar.(5)

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. Masyarakat pun mendukung opsi tersebut karena dianggap mampu mencegah penularan penyakit namun tetap menjaga daya beli masyarakat.Langkah PSBB adalah strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tentu saja hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol yang ada ketika berada diluar rumah.(6)

Walaupun regulasi-regulasi tersebut didasarkan dari status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19 ini. Salah satu kebijakannya yaitu PSBB ini kemudian tetap menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan. Di satu sisi banyak kalangan yang menyatakan sikap untuk mendorong penerapan PSBB dimana hal tersebut dapat memutus mata rantai penularan dari Covid-19 ini dan juga tetap menjaga daya beli dari masyarakat. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula kalangankalangan yang menyatakan sikap supaya pemerintah lebih mendorong untuk mengeluarkan regulasi tentang karantina wilayah yang dianggap bisa lebih efektif dalam menangani Covid-19 ini. (7)

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif untuk mengevaluasi Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar.

Desain penelitian ini adalah quasi kualitatif yang bermaksud untuk mengeksplorasi mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di kota Makassar dengan cara observasi analisis secara mendalam atau wawancara secara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

Adapun, Informan dalam penelitian ini Ketua Gugus Covid -19 dari Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai informan kunci,Kadis Kominfo Kota Makassar sebagai Jubir Gugus Covid-19 ,Kasatpol PP Kota Makassar sebagai Anggota Tim Gugus Covid Kota Makassar,KadisHub Kota Makassar sebagai Anggota Tim Gugus Covid Kota Makassar sebagai informan biasa dan Masyarakat sebagai informan pendukung

Pengumpulan data dilakukan sejak bulan Desember 2020 sampai Januari 2021 tentang Evaluasi Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar.Kemudian, data analisis dilakukan dengan software *Nvivo*.

HASIL

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi Input Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar yaitu:

1. SDM

   Input SDM kebijakan Perwali Kota Makassar No.22 tahun 2020di wilayah Kota Makassarditentukan

dengan berdasarkan surat penugasan yang di SK kan.

Penetapan SK dibuat dengan tujuan agar petugas Ferkopimda dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak salah prosedur ketika turun dimasyarakat.

2. Sumber daya pendukung dan bahan bahan dasar

   Input Sumber daya pendukung dan bahan bahan dasar kebijakan Perwali Kota Makassar No.22 tahun 2020di wilayah Kota Makassar yaitu Pembuatan Posko Perbatasan dan yang menjaga di setiap posko ada Ferkopimda.

   Pembuatan posko bertujuan untuk membuat pintu keluar masuk kota makassar di perbatasan kota maros dan perbatasan gowa serta dilakukan pemeriksaan saat ada yang datang kekota makassar.

3. Sarana dan Prasarana

   Input Sarana dan Prasarana kebijakan Perwali Kota Makassar No.22 tahun 2020 di wilayah Kota Makassar yaitu dilakukan Pembatasan aktivitas, pembuatan posko, dan pembatasan ruangan hal ini sebagai proses pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 diwilayah Kota Makassar.

   Ada beberapa sarana dan prasarana yang dipersiapkan yaitu tempat cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, penerapan jaga jarak, memakai masker, pemeriksaan suhu tubuh.

   Sarana dan prasarana ini bertujuan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dan dapat menekan angka perkembangan Covid.

4. Pendanaan

   Input Pendanaan kebijakan Perwali Kota Makassar No.22 tahun 2020di wilayah Kota Makassar bersumber dari APBD kota makassar melalui rekening BTT(biaya tak terduga)untuk menyelenggarakan suatu kegiatan pemerintahan.

Informasi Tentang Proses Evaluasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar

1. Pelaksanaan

   Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 dimulai pada tanggal 24 april – 8 mei 2020 dan masyarakat mengikuti penerapan protokol kesehatan serta adanya posko pemeriksaan.

   Pelaksanaan kebijakan ini harus di patuhi oleh seluruh masyarakat kota makassar agar dapat memutus mata rantai penularan virus Corona-19 sebab besarnya jumlah populasi masyarakat dan besarnya mobilitas , serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas kerja.

   Namun dari hasil wawancara yang dilakukan di masyarakat masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksaan kebijakan seperti masih adanya masyarakat yang kurang peduli tentang

   Kegiatan pelaksanaan kebijakan perwali no.22 tahun 2020 dikota Makassar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika beraktifitas diluar rumah seperti Protokol kesehatan meliputi menjaga jarak ,

menjaga kebersihan , memakai masker, mencuci tangan.

2. Efektivitas

   Efektivitas Kebijakan Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 yaitu , terbukti dengankasus pada saat diterapkannya kebijakan ini kasus sedikit melandai dan efektif dalam segi waktu dengan dilaksanakan selama 14 hari .

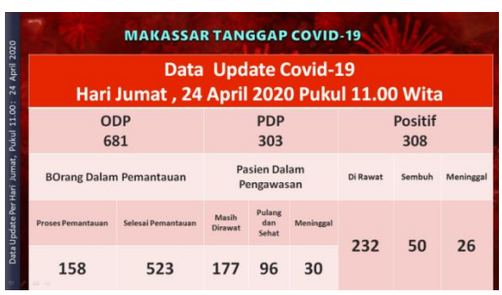
3. Efisiensi

   Efisiensi Kebijakan Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 dilihat dari Tenaga SDM yang sesuai dengan kapasitasnya.

Informasi Tentang Output Evaluasi Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar

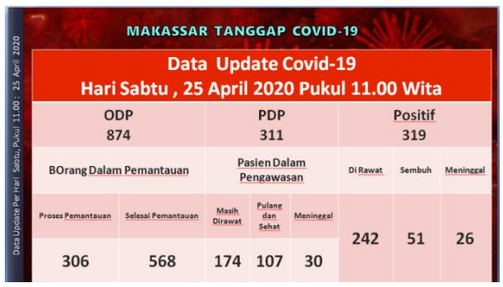
Output kegiatan ini adalah adanya pengurangan jumlah kasus positif Covid 19 sebelum dan sesudah dilakukan PSBB walaupun perbaikannya tidak terlalu tinggi yang dimana perubahannya dari 15 ke 11 perhari dibanding sebelum PSBB.

Data saat Pelaksanaan PSBB



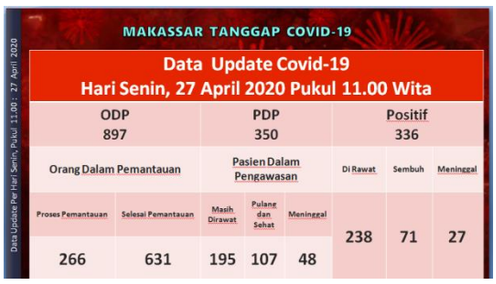
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 1. Update data Covid-19 Hari Jumat 24 April 2020



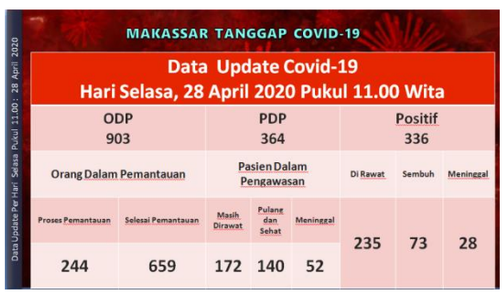
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 2. Update data Covid-19 Hari Sabtu 25 April 2020



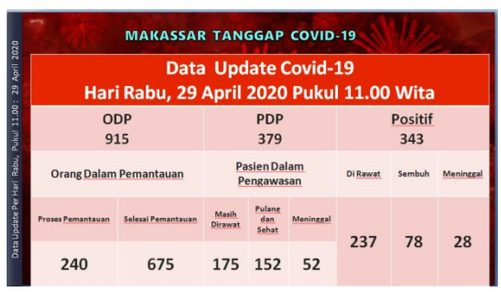
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 3. Update data Covid-19 Hari Senin 27 April 2020



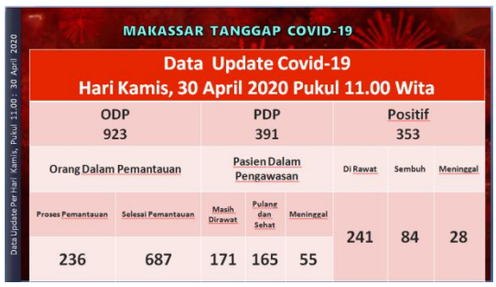
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 4. Update data Covid-19 Hari Selasa 28 April 2020



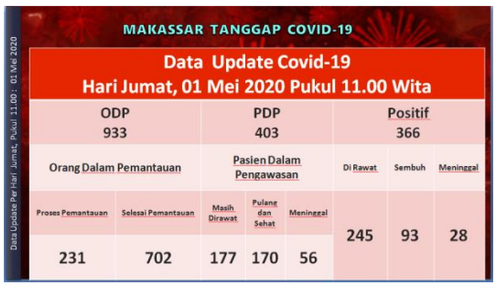
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 5.Update data Covid-19 Hari Rabu 29 April 2020



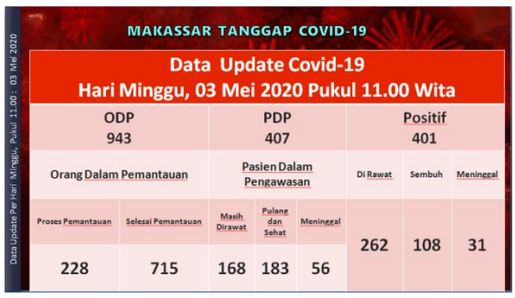
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 6. Update data Covid-19 Hari Kamis 30 April 2020



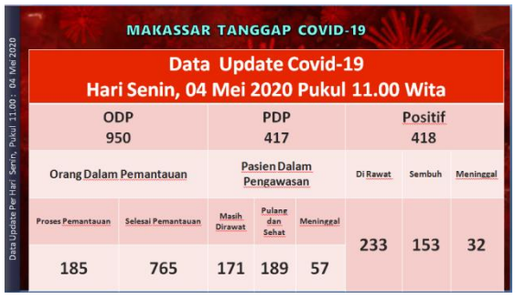
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 7.Update data Covid-19 Hari Jumat 1 Mei 2020



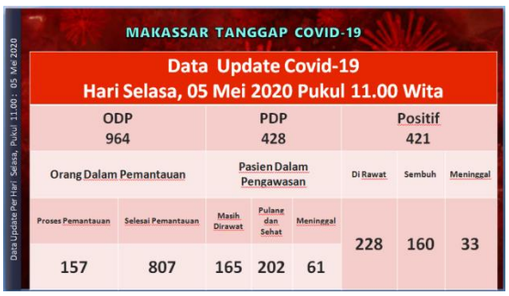
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 8. Update data Covid-19 Hari Minggu 3 Mei 2020



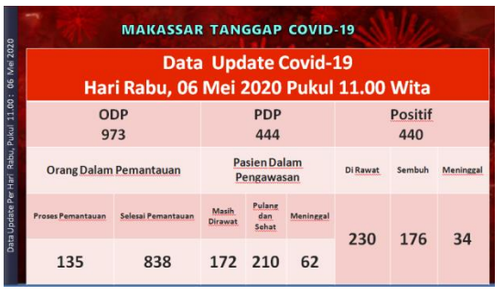
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 9.Update data Covid-19 Hari Senin 4 Mei 2020



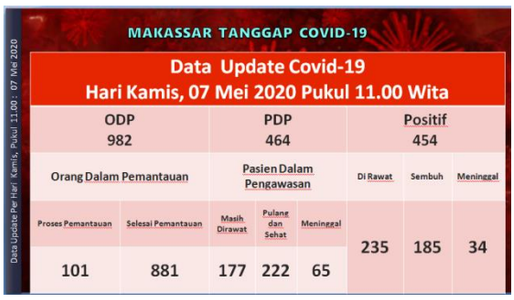
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 10. Update data Covid-19 Hari Selasa 5 Mei 2020



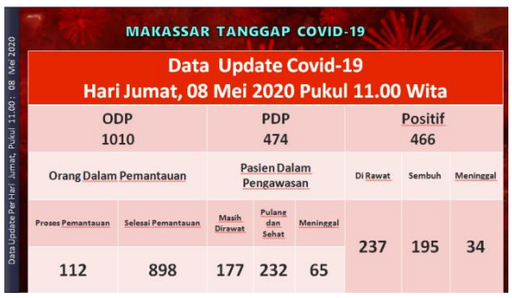
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 11. Update data Covid-19 Hari Rabu 6 Mei 2020



Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

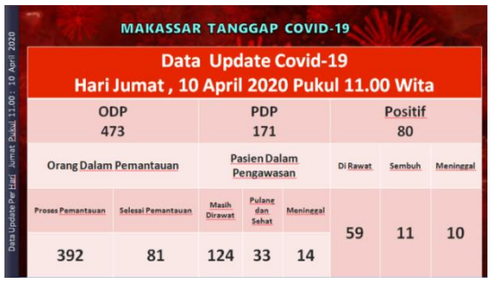
Gambar 12. Update data Covid-19 Hari Kamis 7 Mei 2020



Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

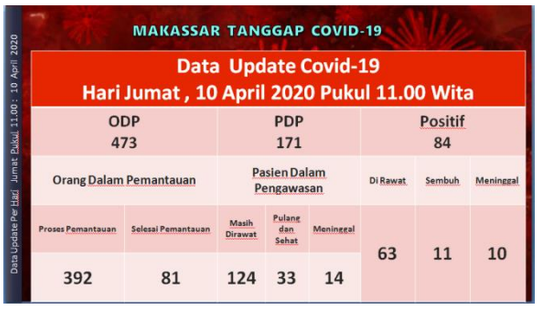
Gambar 13. Update data Covid-19 Hari Jumat 8 Mei 2020

Data Sebelum PSBB



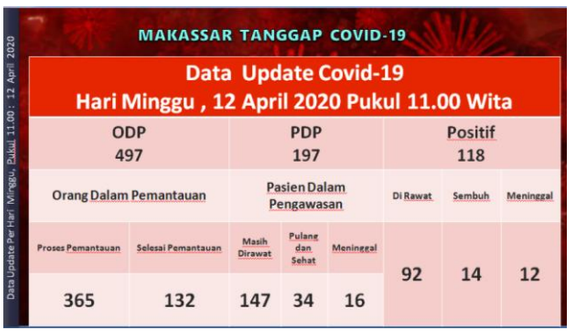
Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 14. Update data Covid-19 Hari Kamis 9 April 2020



Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 5.16Update data Covid-19 Hari Jumat 10 April 2020



Sumber : (Makassar Tanggap Covid, 2020)

Gambar 15. Update data Covid-19 Hari Minggu 12 April 2020

Keberhasilan dari Kebijakan Perwali no. 22 tahun 2020 dapat dilihat dari Tingkat kepatuhan dari data output dari pelaksanaan perwali kepatuhan terhadap protokol kesehatan evaluasinya dilakukan perkacamatan setiap minggu dengan Pak camat.

PEMBAHASAN

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus* 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID19).(8)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau *Covid 19*. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya sehingga himbauan Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan.(9)

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/ kabupaten/ kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Terdapat kaitan

epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.(10)

Dalam PP dan Keppres itu diatur mengenai strategi pemerintah dalam menangani penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Pada prinsipnya pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi COVID-19. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Masyarakat masih dapat laksanakan kegiatan sehari-hari dengan pembatasan - pembatasan tertentu (11)

Pemerintah kota makassar mengeluarkan kebijakan tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Wali Kota Makassar nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.(5)

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Evaluasi Input Kebijakan Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar adalah Sumber daya manusia untuk Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar ditentukan berdasarkan surat penugasan yang di SK kan, adapun petugas dalam kegiatan yang terdiri dari :TNI POLRI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Gugus Covid.

Hal ini sejalan dengan Perwali No 22 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan BAB IV bagian Sumber Daya Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Pasal 21 disebutkan bahwa Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) dikota Makassar, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya .(5)

Sumber daya pendukung untuk Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar yaitu pembuatan posko perbatasan. Posko ini bertujuan sebagai pintu keluar masuk kota makassar yang dimana saat diperbatasan dilakukan pemeriksaan.

Ada beberapa titik posko yang di bentuk , yaitu :

1. Moncongloe
2. Maros
3. Sudiang
4. Gowa
5. Hertasning
6. Sultan alauddin
7. Tamangapa
8. Takalar derah barombong atau tanjung

Menurut Reksohadiprodjo, Sukanto, & Indriyo, (2000) mengatakan bahwa sumberdaya pendukung merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Kekurangan sumberdaya pendukung dapat berakibat terhentinya produktivitas kegiatan. Tersedianya bahan dasar yang cukup merupakan faktor penting guna menjamin kelancaran proses produktivitas.

Sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan ini diantaranya pembatasan aktivitas , pembuatan posko, dan pembatasan ruangan. Pembatasan aktivitas yang dimaksudkan yaitu hanya 50% yang

melaksanakan kegiatan dalam suatu tempat kerja atau perkantoran dari total keseluruhan. Pembuatan posko dibeberapa titik dikota Makassar , perbatasan maros,perbatasan gowa dan perbatasan takalar. Untuk pembatasan ruangan misalkan jumlah yang seharusnya dalam ruangan 100 orang dibatasai sampai 50% dari kapasitasnya , hal ini dapat dilihat di tempat ibadah atau tempat kerja .

Hal ini sejalan dengan Perwali No 22 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan BAB II bagian Pelaksanaan PSBB Pasal 22 ayat 3 disebutkan bahwa pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(5)

Sumber pendanaan kegiatan pelaksanaan PSBB dikota Makasaar bersumber dari APBD Kota Makassar melalui rekening BTT (Biaya Tak Terduga).

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Proses dari Kebijakan Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar bahwa proses Kebijakan Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar adalah Pelaksanaan PSBB, efektivitas dan efisiensi.

Pelaksanaan kebijakan ini harus di patuhi oleh seluruh masyarakat kota makassar agar dapat memutus mata rantai penularan virus Corona-19 sebab besarnya jumlah populasi masyarakat dan besarnya mobilitas , serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktivitas kerja.

Kegiatan pelaksanaan kebijakan perwali no.22 tahun 2020 dikota Makassarada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika beraktifitas diluar rumah seperti Protokol kesehatan meliputi menjaga jarak , menjaga kebersihakan , memakai masker

Penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian (Pujaningsih, 2020) bahwa kegiatan PSBB meliputi pemakaian wajib masker saat ke luar rumah bagi warga. Hal ini diawasi karena pemakaian masker ini dapat meminimalisir penularan Covid-19. (12)

Efektivitas Kebijakan Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 dalam segi waktu dengan dilaksanakan selama 14 hari yaitu dimulai dari tanggal 24 April-8 Mei 2020 , pemberlakukan PSBB ini ditetapkan oleh Walikota Kota Makassar.

Efisiensi Kebijakan Peraturan Wali Kota Makassar nomor.22 Tahun 2020 dilihat dari Tenaga SDM yang sesuai dengan kapasitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Output Kebijakan Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar

Keberhasilan Pelaksanaan PSBB dilihat dari evaluasi protokol kesehatan ,evaluasinya dilakukan perkacamatan setiap minggu dengan Ketua Camat Kota Makassar. Protokol kesehatan meliputi 3M memakai masker , mencuci tangan dan menjaga jarak.

Hal ini sejalan dengan Perwali No 22 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan BAB V

bagian Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Pasal 23 disebutkan bahwa " Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease (Covid-19)".(5)

Adanya pengurangan jumlah kasus positif Covid 19 sebelum dan sesudah dilakukan PSBB walaupun perbaikannya tidak terlalu tinggi yang dimana perubahannya dari 15 ke 11 perhari dibanding sebelum pelaksanaan PSBB. Hal ini dianggap sebagai keberhasilan pelaksanaan PSBB.

Hal ini sejalan dengan Perwali No 22 tahun 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan BAB V bagian Pemantauan , Evaluasi dan Pelaporan Pasal 23ayat 3 disebutkan bahwa " Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1. (5)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa adanya kebijakan perwali no.22 tahun 2020 dikota Makassar tetap menuai pro dan kontra dari beberapa kalangan,disatu sisi banyak kalangan yang menyatakan sikap untuk mendorong penerapan PSBB dimana hal tersebut dapat memutus mata rantai penularan dari Covid-19

Saran

Pemerintah jika ingin melaksanakan kembali kebijakan PSBB untuk menekan angka penyebaran Covid-19 harus lebih tegas kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan membandingkan angka keberhasilan kebijakan PSBB yang dilakukan pada PSBB 1 dan PSBB 2.

DAFTAR PUSTAKA

1. Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M.,

2. Kemenkes RI. (2020a). 3 Provinsi Ini Paling Tinggi Tingkat Penularan COVID-19. *Kemkes.Go.Id*, 7–8. https://www.kemkes.go.id/article/view/20061000002/3-provinsi-ini-paling-tinggi-tingkat-penularan-covid-19.html

3. Mona, N. (2020). Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, *2*(2), 117–125.

4. Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *7*(3). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083

5. Makassar, P. K. (2020). *Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 tahun 2020 tentang Pelaksaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*.

6. Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *7*(7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569

7. Permadi, P. L. (2020). Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan Psbb Dalam Penanggulangan Covid-19. *Jurnal Kertha*

8. Kemenkes RI. (2019). Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19 Kementerian Kesehatan. *Kementerian Kesehatan RI*, *8*, 1–8. file:///D:/uts online/FAQ coronavirus disease-COVID-19 Kementerian Kesehatan 2020.pdf%0D

9. Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, *4 No. 1*, 115–120.

10. Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, *3*(2), 240–249. https://doi.org/10.14710/ALJ.V3I2.240-249

11. Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *4*(2), 240–252. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.11

12. Pujaningsih, N. N. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. *Moderat*, *6*, 458–470.